



Katalog BPS : 3102005.91

INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011

<http://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011

ISSN : 2252-3251
Katalog BPS : 3102005.91
No. Publikasi : 91300.11.16
Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman : vi + 50 Halaman

Naskah:

Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Kata Pengantar

Publikasi “Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2011” merupakan sajian informasi yang dipersiapkan secara khusus bagi para pimpinan. Penyajian dalam publikasi ini dirancang secara ringkas dan padat, dilatarbelakangi oleh keterbatasan waktu yang tersedia bagi para pimpinan untuk menyarikan suatu informasi dari suatu sajian yang rinci.

Informasi yang disajikan terdiri atas inflasi yang memberikan gambaran tentang perkembangan daya beli masyarakat daerah perkotaan maupun di pedesaan. Nilai tukar petani akan memberikan informasi tentang kesejahteraan petani. Statistik pertanian menyajikan informasi tentang produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar.

Bagian lain publikasi ini juga menyajikan informasi tentang angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Sajian ketenagakerjaan ini dilengkapi pula dengan gambaran kinerja perekonomian melalui data pertumbuhan dan struktur ekonomi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan pembangunan ekonomi, disajikan pula informasi tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan, baik berupa absolut dan persentase penduduk miskin; kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta distribusi pendapatan.

Informasi yang tersaji dalam publikasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyajian pada masa mendatang.

Manokwari, Desember 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat,



Ir. Tanda Sirait, MM
NIP. 195507211978011002



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
<hr/>	
INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL	1
A. KETENAGAKERJAAN	2
1. Angkatan Kerja	2
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3
3. Penduduk yang Bekerja	5
<hr/>	
B. KEMISKINAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	8
1. Perkembangan Penduduk Miskin	8
2. Perkembangan Garis Kemiskinan	10
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	12
4. Indeks Pembangunan Manusia	14
<hr/>	
C. PERTANIAN	16
1. Produksi Padi	16
2. Produksi Jagung	17
3. Produksi Kedelai	19
4. Produksi Ubi Kayu	20
5. Produksi Ubi Jalar	21
<hr/>	
D. NILAI TUKAR PETANI (NTP)	22
1. Perkembangan Nilai Tukar Petani	22
2. Perkembangan Nilai Tukar Petani menurut Subsektor	24
<hr/>	
E. INFLASI PEDESAAN	25
<hr/>	



Daftar Isi

F. INFLASI	29
G. Kinerja Perekonomian 2011	34
1. Struktur Ekonomi	34
2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha	37
3. Pertumbuhan Ekonomi menurut Penggunaan	40
4. PDRB Per Kapita	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	44



Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Agustus 2009-Agustus 2011	3
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2009-Agustus 2011	5
3	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan	7
4	Garis Kemiskinan dan Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2008-September 2011	18
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Papua Barat, Maret 2008-September 2011	13
6	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011	17
7	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011	18
8	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011	19
9	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011	20
10	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011	22
11	Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2011 (2007=100)	26
12	Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2011 (2007=100)	28
13	Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2011 (2007=100)	30



Daftar Tabel

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
13	Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2011 (2007=100)	30
14	Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (2007=100)	32
15	Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2011 (2007=100)	33
16	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011	35
17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011	36
18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011	39
19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011	41



Daftar Gambar

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Perkembangan Kemiskinan (Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan) Papua Barat Tahun 2008-2011	8
2	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2010	15
3	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari-Desember 2011 Provinsi Papua Barat (2007=100)	23
4	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat 2008-2011 (2007=100)	23
5	Perkembangan Nilai tukar Petani Menurut Subsektor Papua Barat Tahun 2009-2011	24
6	Perkembangan Laju Inflasi Pedesaan Februari 2008-Desember 2011 Provinsi Papua Barat (2007=100)	27
7	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Papua Barat Januari 2008-Desember 2011	31
8	PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2011	41





Di era globalisasi seperti sekarang ini data dan informasi menjadi kebutuhan yang sangat esensial dalam berbagai aspek kehidupan. Data dan informasi yang *up to date*, akurat, dan akuntabel memiliki banyak keuntungan. Pihak-pihak yang mampu memanfaatkan data dan informasi dengan cepat dan akurat akan menjadi ‘pemenang’ dalam seleksi alam era globalisasi. Dengan pemanfaatan informasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan berjalan dengan efektif dan efisien terutama dalam kegiatan pembangunan daerah.

Slogan ‘membangun memang mahal, tetapi membangun tanpa data akan jauh lebih mahal’ adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa data dan informasi itu menjadi hal yang esensial dalam proses pembangunan. Data dapat dihasilkan dari sebuah survei ataupun sensus dari banyak produsen data, misalnya BPS, SKPD, lembaga survei independen, akademisi, NGO, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak data tersebut hanya data yang bersifat akurat, relevan, *up to date*, akuntabel, independen, serta dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah memiliki nilai lebih dan layak untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu produsen data nasional memiliki karakteristik tersebut. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS merupakan lembaga pengumpul data statistik dasar. Disamping itu, BPS juga mengumpulkan data yang berasal dari kegiatan survei dengan dimensi yang sangat luas, hal ini tercermin dari ragam data yang dihasilkan bagi para konsumen data. Mulai dari data inflasi, NTP, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, produksi pertanian, pariwisata dan lain-lain.

“Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat Tahun 2011” adalah sebuah tulisan yang dirancang khusus untuk level pimpinan dengan maksud bisa menjadi sumber informasi untuk memahami pencapaian kinerja yang dapat dievaluasi secara terukur. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah sejumlah indikator penting seperti ketenagakerjaan, kemiskinan dan pembangunan manusia, angka ramalan pertanian, nilai tukar petani, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi.





A. KETENAGAKERJAAN

1. Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan rasio jumlah penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, dan menjadi indikator besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) untuk sektor ekonomi yang memproduksi barang-barang dan jasa.

Jumlah angkatan kerja di Papua Barat pada Agustus 2011 mencapai 369.619 orang, meningkat dibandingkan dengan kondisi Agustus 2010 sebesar 342.888 orang. Namun sebelumnya mengalami penurunan terhadap tahun 2009, dimana angkatan kerja pada saat itu mencapai 352.358 orang. Struktur penduduk usia muda di Papua Barat berdampak pada semakin meningkatnya penduduk usia kerja, dimana secara otomatis juga meningkatkan jumlah angkatan kerja.

Dalam *The Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang diterbitkan oleh ILO disebutkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labour Force Participation Rate*) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting. Berdasarkan tingkat partisipasinya terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas), TPAK Papua Barat terus mengalami peningkatan. Di tahun 2009 TPAK Papua Barat sebesar 68,52 persen. Selanjutnya di tahun 2010 dan tahun 2011, TPAK kembali mengalami peningkatan berturut-turut mencapai sebesar 69,29 persen dan 70,78 persen. Peningkatan TPAK tahun 2011 terhadap tahun 2010 ini dipengaruhi oleh peningkatan tajam penduduk yang bekerja disamping pengangguran yang meningkat pula, serta laju peningkatan penduduk bukan angkatan kerja tidak secepat laju dua komponen tersebut.





Tabel 1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Agustus 2009-Agustus 2011			
	Uraian	Agustus		
		2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	
Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	481.799	494.862	522.211	
Angkatan Kerja	330.121	342.888	369.619	
• Bekerja	305.177	316.547	336.588	
• Pengangguran	24.944	26.341	33.031	
Bukan Angkatan Kerja	151.678	151.974	152.592	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,52	69,29	70,78	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,56	7,68	8,94	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2009-2011

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ketenagakerjaan yang sering dijadikan sebagai parameter keberhasilan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Semakin rendah angka TPT di suatu daerah dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja telah berjalan dengan baik karena permintaan akan lapangan pekerjaan (*supply*) dapat dipenuhi sebagian besar pasar tenaga kerja (*demand*).

TPT merupakan rasio antara jumlah penduduk yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan (pengangguran) dengan jumlah penduduk yang tercakup sebagai angkatan kerja. Dengan kata lain TPT menggambarkan berapa jumlah pengangguran diantara 100 orang angkatan kerja. Perkembangan indikator ketenagakerjaan tersebut disajikan pada Tabel 1.



Papua Barat memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar dimana setiap tahun diantara penduduk tersebut memasuki usia kerja dan siap tergolong menjadi angkatan kerja kecuali penduduk tersebut masuk sebagai bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya). Dengan besarnya proporsi penduduk yang siap masuk dalam angkatan kerja maka lapangan kerja yang tersedia pun harus cukup tersedia untuk menampung angkatan kerja baru maupun angkatan kerja lama yang masih berstatus sebagai pengangguran. Bila hal ini tidak dipenuhi maka jumlah pengangguran akan terus meningkat setiap tahun dan kumulatif pengangguran tersebut akan semakin besar bila kecepatan laju penyediaan lapangan pekerjaan tidak dapat mengimbangi kecepatan laju penambahan angkatan kerja yang terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sebagai catatan, Papua Barat memiliki laju pertumbuhan tertinggi keempat di Indonesia (3,71 persen) berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

Jumlah pengangguran di Papua Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009. Di tahun 2009 jumlah pengangguran sebanyak 24.944 orang. Di tahun 2010 jumlah pengangguran mengalami peningkatan menjadi 26.341 orang. Selanjutnya di tahun 2011 pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 6.690 orang menjadi 33.031 orang.

TPT Papua Barat pun terus mengalami peningkatan selama tahun 2009-2011. Di tahun 2010, angka TPT Papua Barat meningkat dari 7,56 persen menjadi 7,68 persen. Selanjutnya di tahun 2011 angka TPT kembali mengalami peningkatan, persentase mencapai 8,94 persen. Nilai TPT 8,94 persen mengandung makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 9-10 orang diantaranya adalah pengangguran. Menurut catatan, nilai TPT ini adalah yang terbesar di Papua Barat setelah kondisi Agustus 2007 yang pernah mencapai 9,46 persen. Pada Agustus 2011 ini, Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka TPT tertinggi kelima di Indonesia setelah Provinsi Banten (13,06%); Provinsi DKI Jakarta (10,80%); Provinsi Kalimantan Timur (9,84%); dan Provinsi Jawa Barat (9,83%).





3. Penduduk Bekerja

Angkatan kerja terdiri dari dua komponen, yaitu pengangguran dan penduduk yang bekerja. Sedangkan konsep bekerja yang diadopsi dari *International Labour Organization* (ILO) menggunakan pendekatan kriteria satu jam bekerja (*the one-hour criterion*), yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Konsep ini telah dipakai secara internasional sehingga dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Situasi ketenagakerjaan pada Agustus 2011 dibandingkan Agustus 2010 ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Penduduk yang bekerja kondisi Agustus 2011 meningkat menjadi 336.588 orang dari 316.547 orang pada Agustus 2010. Sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja Agustus 2010 juga mengalami peningkatan dimana saat kondisi Agustus 2009 mencapai 305.177 orang.

Tabel 2.		Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2009-Agustus 2011					
Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2009		Agustus 2010		Agustus 2011		
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Pertanian	172.721	56,60	171.060	54,04	163.164	48,48	
Industri	11.404	3,74	12.300	3,89	11.580	3,44	
Perdagangan	31.705	10,39	37.852	11,96	56.325	16,73	
Jasa-jasa	48.484	15,89	54.070	17,08	58.731	17,45	
Lainnya	40.863	13,39	41.265	13,04	46.788	13,90	
TOTAL	305.177	100,00	316.547	100,00	336.588	100,00	

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2009-2011

*) Lainnya : Pertambangan dan Penggalan; Listrik, Gas, dan Air; Konstruksi; Transportasi; serta Keuangan dan Jasa Perusahaan



Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja Agustus 2011 bertambah sebanyak 20.041 orang terhadap Agustus 2010. Diantara penambahan jumlah tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada lapangan pekerjaan perdagangan, yakni bertambah sebanyak 18.473 orang selama setahun. Namun justru sebaliknya terjadi pada sektor pertanian, sektor ini mengalami penurunan pekerja mencapai 7.896 orang. Penurunan di sektor pertanian memang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Penduduk usia kerja telah mulai meninggalkan sektor ini dan beralih ke sektor lainnya yang dinilai lebih menjanjikan. Meskipun demikian, setidaknya sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Papua Barat.

Sektor pertanian selalu menjadi kontributor utama tenaga kerja di Papua Barat selama ini. Namun kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari masa ke masa. Di tahun 2009, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 56,60 persen dari total pekerja di Papua Barat. Kemudian kontribusinya mengalami penurunan menjadi 54,04 persen di tahun 2010 dan kembali menurun menjadi 48,48 persen di tahun 2011. Sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa menjadi sektor yang terus konsisten menunjukkan peningkatan kontribusi distribusi pekerja dan memberikan kontribusi yang signifikan di Papua Barat. Sektor perdagangan kontribusinya meningkat dari 10,39 persen di tahun 2009 menjadi 16,73 persen di tahun 2011. Disisi lain, sektor jasa-jasa juga menunjukkan tren positif dengan terus meningkat dari 15,89 persen di tahun 2009 menjadi 17,45 persen di tahun 2011.

Status pekerjaan utama digunakan untuk mengelompokkan kegiatan pekerja. Pekerja formal adalah pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan, selain dalam kategori tersebut termasuk sebagai pekerja informal. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, terjadi tren peningkatan pekerja formal dalam tiga tahun terakhir. Pekerja sektor formal meningkat dari 28,78 persen pada Agustus 2009 menjadi 32,61 persen pada Agustus 2010 dan 38,21 persen pada Agustus 2011. Sebaliknya pekerja pada kegiatan informal turun dari 71,22 persen pada





Agustus 2009 menjadi 67,39 persen pada Agustus 2010. Pekerja di sektor informal kembali mengalami penurunan pada kondisi Agustus 2011 menjadi 61,79 persen. Tren positif peningkatan pekerja formal ini diduga akan membawa perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga karena umumnya pekerja di sektor formal memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik dari pekerja di sektor informal.

Dari 336.588 penduduk yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 122.001 orang (36,25 persen), pekerja tak dibayar 73.777 (21,92 persen), berusaha sendiri 65.828 orang (19,56 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap 61.194 orang (18,18 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas di pertanian sebanyak 1.576 orang (0,47 persen). Jika dibandingkan keadaan dua tahun yang lalu, struktur pekerjaan menurut status pekerjaan relatif tidak stabil, khususnya pada berusaha sendiri dan pekerja bebas di non pertanian.

Tabel 3. Status Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama Agustus 2009-Agustus 2011		
	Agustus		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	57.116	48.917	65.828
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	80.280	81.975	61.194
Berusaha dibantu buruh tetap	5.320	5.166	6.612
Buruh/Karyawan/Pegawai	82.504	98.076	122.001
Pekerja Bebas di Pertanian	4.562	694	1.576
Pekerja Bebas di Non Pertanian	5.204	3.139	5.600
Pekerja Tidak Dibayar	70.191	78.589	73.777
TOTAL	305.177	316.547	336.588

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2009-2011

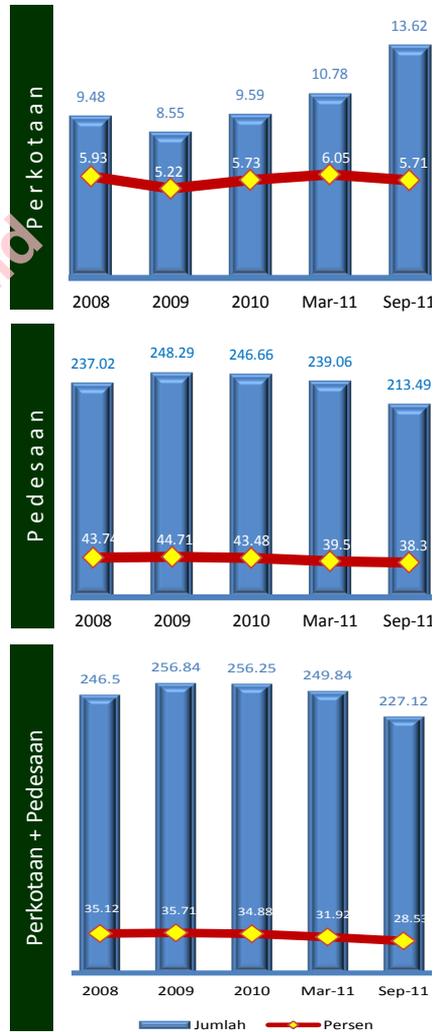


B. KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan dengan pendekatan *benchmark* garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin bila berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan garis kemiskinan



Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan (Perkotaan, Pedesaan, dan Perkotaan+Pedesaan) Papua Barat Tahun 2008-2011





makanan digunakan standar kebutuhan hidup minimum 2100 Kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

Secara nasional, persentase penduduk miskin Papua Barat kondisi September 2011 (28,53 persen) adalah yang tertinggi kedua setelah Provinsi Papua (31,24 persen). Kedua provinsi tersebut selama ini selalu menjadi daerah dengan persentase kemiskinan terbesar. Selama periode tahun 2008–2011, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren menurun. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 246.500 jiwa (35,12 persen) pada tahun 2008 turun menjadi 227.120 jiwa (28,53 persen) pada kondisi September 2011. Jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir (periode 2008–2011) secara agregat turun sebesar 19.380 jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 6,59 persen.

Penurunan angka kemiskinan Provinsi Papua Barat selama Maret 2009–September 2011 sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2008 tercatat 237.020 jiwa (43,74 persen) turun menjadi 213.490 jiwa (38,30 persen) pada September 2011. Penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan Maret 2009–September 2011 sebesar 23.530 jiwa lebih tinggi daripada penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat. Sedangkan penurunan persentase penduduk miskin mencapai 5,44 persen.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di perkotaan selama Maret 2008–September 2011 meningkat. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 9.480 jiwa pada Maret 2008 menjadi 13.620 jiwa pada kondisi September 2011. Sementara itu, meskipun jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat namun persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan, yaitu dari 5,93 persen pada Maret 2008 menjadi 5,71 persen pada kondisi September 2011.





2. Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat September 2011 sebesar 334.449 rupiah/kapita/bulan terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 260.009 rupiah/kapita/bulan dan garis kemiskinan non makanan sebesar 74.440 rupiah/kapita/bulan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan total (makanan dan non makanan) sebesar 77,74 persen.

Dibanding Maret 2011, garis kemiskinan Papua Barat September 2011 mengalami kenaikan sebesar 4,91 persen. Kenaikan garis kemiskinan pada September 2011 di perkotaan (3,94 persen) lebih rendah daripada kenaikan garis kemiskinan di pedesaan (4,29 persen). Sebagai pembandingan, inflasi Maret-September 2011 (perbandingan IHK Maret 2011 dengan IHK September 2011) tercatat 2,98 persen, sementara kondisi perubahan harga Maret-September 2011 di pedesaan tercatat deflasi -0,08 persen.

Secara umum, inflasi Papua Barat tergolong rendah pada periode tersebut (Maret-September). Bahkan inflasi tahun kalender Papua Barat 2011 turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010. Inflasi tahun kalender 2011 hanya sebesar 2,36 jauh menurun dibandingkan tahun 2009 (6,25 persen) dan tahun 2010 (5,22 persen). Inflasi yang terbilang rendah ini dapat menaikkan daya beli masyarakat, sebagai akibatnya masyarakat lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan kondisi tersebut jumlah penduduk miskin Papua Barat September 2011 turun sebanyak 19.380 jiwa dan persentasenya turun dari 31,92 persen menjadi 28,53 persen.

Peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sejalan dengan Inflasi Maret-September 2011 sebesar 2,98 persen. Demikian pula dengan penurunan signifikan penduduk miskin di daerah perkotaan secara tidak langsung dipengaruhi oleh penurunan tingkat harga pada September terhadap Maret 2011 dengan terjadi penurunan IHK pedesaan dari 133,25 menjadi 133,15 sehingga mengakibatkan deflasi sebesar -0,08 persen.



Tabel 4.		Garis Kemiskinan dan Perubahan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2008-September 2011				
Uraian	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Perubahan (%)		
	Makanan	Non Makanan	Total	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Maret 2008	180.866	63.941	244.807	16,84	-13,82	-16,95
Maret 2009	223.357	81.373	304.730	24,48	-9,81	-11,97
Maret 2010	233.764	85.406	319.170	4,74	12,16	9,77
Maret 2011	251.752	90.958	342.709	7,38	12,41	5,58
September 2011	253.678	97.544	356.222	3,94	26,34	-5,62
Pedesaan						
Maret 2008	197.785	32.469	230.254	12,34	-7,34	-10,41
Maret 2009	223.592	45.762	269.354	16,98	4,75	2,22
Maret 2010	238.145	49.367	287.512	6,74	-0,66	-2,75
Maret 2011	255.647	56.090	311.737	8,43	-3,08	-9,02
September 2011	260.579	64.549	325.128	4,29	-10,70	-3,18
Perkotaan+Pedesaan						
Maret 2008	193.930	39.641	233.571	13,39	-7,61	-10,66
Maret 2009	223.538	53.878	277.416	18,77	4,19	1,68
Maret 2010	237.147	57.580	294.727	6,24	-0,23	-2,32
Maret 2011	254.759	64.036	318.796	8,17	-2,5	-8,49
September 2011	260.009	74.440	334.449	4,91	-9,09	-10,62

Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2011



3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selaras dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat selama periode Maret-September 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Papua Barat September 2011 menurun dibandingkan kondisi Maret 2011 dari 8,78 menjadi 7,57. Sayangnya penurunan P_1 hanya terjadi di daerah pedesaan saja (dari 11,13 menjadi 10,32), sedangkan P_1 di perkotaan justru mengalami peningkatan (0,80 menjadi 1,14). Hal serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan. Secara umum Indeks P_2 Papua Barat juga mengalami penurunan yaitu dari 3,43 pada kondisi Maret 2011 menjadi 2,74 untuk keadaan September 2011. Kondisi serupa juga terjadi bila dilihat dari sisi wilayah kota-desa. Indeks P_2 di pedesaan mengalami penurunan (dari 4,40 menjadi 3,43) akan tetapi di daerah perkotaan nilai Indeks P_2 -nya meningkat (dari 0,14 menjadi 0,36).

Penurunan kedua nilai indeks (Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan) keadaan September ini mengandung makna bahwa kondisi kemiskinan di Papua Barat menjadi semakin membaik. Artinya rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat dan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah. Jumlah dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan untuk daerah pedesaan telah berhasil turun. Permasalahan utama kemiskinan berada pada daerah perkotaan. Indikator-indikator kemiskinan menunjukkan tren yang semakin meningkat, namun bukan berarti masalah kemiskinan di pedesaan telah terselesaikan. Program-program pemerintah yang pro penduduk miskin (*pro poor policy*) mutlak diperlukan mengingat posisi Papua Barat berada di urutan kedua provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli, serta mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar penduduk miskin, misalnya dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.



Tabel 5.		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Papua Barat, Maret 2008-September 2011		
Uraian	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)				
Maret 2008	0,73	11,67	9,18	
Maret 2009	0,43	12,51	9,75	
Maret 2010	1,14	13,22	10,47	
Maret 2011	0,80	11,13	8,78	
September 2011	1,14	10,32	7,57	
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)				
Maret 2008	0,24	4,46	3,50	
Maret 2009	0,04	4,61	3,57	
Maret 2010	0,36	5,47	4,30	
Maret 2011	0,14	4,40	3,43	
September 2011	0,36	3,76	2,74	

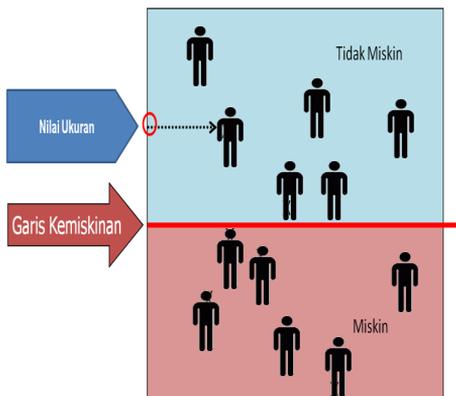
Sumber : Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2011

Indeks Kedalaman Kemiskinan:

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan:

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.





4. Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sempitnya kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah merupakan akar permasalahan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk Papua Barat 2000-2010 tergolong tinggi yaitu mencapai 3,71 persen. Nilai pertumbuhan ini adalah yang tertinggi keempat di Indonesia setelah Provinsi Papua (5,39%); Provinsi Kepulauan Riau (4,95%); dan Provinsi Kalimantan Timur (3,81%). Sedangkan sempitnya kesempatan kerja direfleksikan dari tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka TPT Papua Barat mencapai 8,94 persen pada kondisi Agustus 2011. Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka TPT tertinggi kelima di Indonesia setelah Provinsi Banten (13,06%); Provinsi DKI Jakarta (10,80%); dan Provinsi Kalimantan Timur (9,84%); dan Provinsi Jawa Barat (9,83%).

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM terdapat tiga komponen utama dalam mengukur pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup), dimensi pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta dimensi ekonomi digambarkan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM Papua Barat tahun 2010 mencapai 69,15 yang dibentuk oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 68,51 tahun (nilai indeks 72,51); Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 93,19 persen (nilai indeks 93,19) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,21 tahun (nilai indeks 54,74); serta *Purchasing Power Parity* sebesar 596.080 rupiah per kapita per bulan (nilai indeks 54,56). Khusus untuk indeks pendidikan, merupakan gabungan antara indeks angka melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah dengan proporsi penimbang 2:1 (dua per tiga AMH dan sepertiga RLS). Dengan demikian, Nilai indeks pendidikan Papua Barat mencapai 80,38. Ketiga nilai indeks tersebutlah yang membentuk angka IPM Papua Barat.



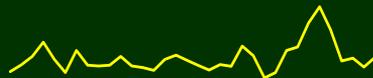


Berdasarkan kriteria pengelompokan IPM menurut UNDP, IPM Papua Barat termasuk kedalam kelompok menengah dengan interval 50,00-79,99. Sedangkan posisi IPM Papua Barat tahun 2010 diantara provinsi lainnya secara nasional berada pada peringkat ke-29 dari 33 provinsi. Semula, sebelum tahun 2010, peringkat Papua Barat selalu berada di peringkat ke-30 dari 33 provinsi. Di tahun 2010, peringkat IPM Papua Barat meningkat satu tingkat menggeser posisi Maluku Utara yang sebelumnya berada di peringkat ke-29 di Indonesia.

IPM tertinggi kabupaten/kota di Papua Barat berada di Kota Sorong dengan nilai IPM sebesar 77,18, sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 50,51. Peringkat IPM kabupaten/kota di Papua Barat diantara kabupaten/kota di seluruh Indonesia cukup mengkhawatirkan. Tujuh dari sebelas kabupaten/kota di Papua Barat memiliki peringkat diatas 400 dari sekitar 497 kabupaten/kota secara nasional. Kota Sorong yang merupakan peraih nilai IPM tertinggi di Papua Barat hanya berada di peringkat ke-31, sedangkan Kabupaten Tambrauw peraih nilai IPM terendah di Papua Barat berada di peringkat ke-485 di Indonesia.



Peringkat Nasional IPM Kabupaten/Kota	
1.	Fakfak 230
2.	Kaimana 311
3.	Teluk Wondama 451
4.	Teluk Bintuni 439
5.	Manokwari 426
6.	Sorong Selatan 444
7.	Sorong 387
8.	Raja Ampat 463
9.	Tambrauw 485
10.	Maybrat 448
11.	Kota Sorong 31



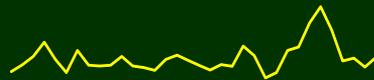
C. PERTANIAN

1. Produksi Padi

Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2010 sebesar 34,22 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), terjadi penurunan sebanyak 2,73 ribu ton (7,38 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2009. Penurunan produksi tahun 2009 terjadi karena adanya penurunan luas panen seluas 1.022 hektar atau 9,75 persen, sedangkan produktivitas naik sebesar 0,93 kwintal/hektar (2,64 persen). Penurunan produksi padi tahun 2010 disumbang oleh penurunan produksi padi sawah yang cukup besar yaitu sebanyak 1.570 ton (4,55 persen) dan produksi padi ladang juga menurun sebesar 46,21 persen atau sebanyak 1,16 ribu ton. Penurunan produksi padi ladang maupun padi sawah disebabkan oleh adanya penurunan luas panen. Luas panen padi sawah menurun 562 hektar (5,90 persen), sedangkan padi ladang sebesar 460 hektar (48,17 persen). Meskipun demikian, produktivitas pada masing-masing jenis padi tersebut mengalami peningkatan. Padi sawah produktivitasnya meningkat 0,52 kwintal/hektar (1,44 persen) dan padi ladang produktivitasnya meningkat 0,99 kwintal/hektar (3,77 persen).

Angka Ramalan III (ARAM III) produksi padi tahun 2011 diperkirakan sebesar 36,05 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), terjadi peningkatan sebanyak 1,79 ribu ton (5,24 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Peningkatan produksi tahun 2010 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan luas panen sebesar 499 hektar atau 5,27 persen, sedangkan produktivitasnya diperkirakan akan turun sebesar 0,02 kwintal/hektar (0,06 persen). Peningkatan luas panen ini dikontribusi oleh peningkatan luas panen padi ladang, yaitu sebesar 985 hektar (198,99 persen). Dengan peningkatan luas panen yang signifikan ini, membuat produksi padi ladang diperkirakan meningkat mencapai 2,44 ton (180,96 persen). Meskipun demikian, produktivitas padi ladang mengalami penurunan sebesar 1,64 kwintal/hektar (6,01 persen).





Tabel 6.

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009-2010		Perkembangan 2010-Aram III 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PADI SAWAH							
Luas Panen (Ha)	9,531	8,969	8,433	-562	-5.90	-486	-5.42
Produktivitas (Kw/Ha)	36.17	36.69	38.02	0.52	1.44	1.33	3.62
Produksi (Ton)	34,475	32,905	32,256	-1,570	-4.55	-649	-1.97
PADI LADANG							
Luas Panen (Ha)	955	495	1480	-460	-48.17	985	198.99
Produktivitas (Kw/Ha)	26.28	27.27	25.63	0.99	3.77	-1.64	-6.01
Produksi (Ton)	2,510	1,350	3,793	-1,160	-46.21	2,443	180.96
PADI (SAWAH + LADANG)							
Luas Panen (Ha)	10,486	9,464	9,963	-1,022	-9.75	499	5.27
Produktivitas (Kw/Ha)	35.27	36.2	36.18	0.93	2.64	-0.02	-0.06
Produksi (Ton)	36,985	34,255	36,049	-2,730	-7.38	1,794	5.24

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2009-2011

2. Produksi Jagung

Angka Tetap (ATAP) produksi jagung tahun 2010 sebesar 1,93 ribu ton Pipilan Kering atau meningkat sebesar 346 ton (21,83 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2009. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen yang cukup besar yaitu sekitar 197 hektar (20,41 persen), produktivitasnya pun meningkat sebesar 0,20 kuintal/hektar (1,22 persen) menjadi 16,62 kuintal/hektar.





Peningkatan produksi jagung tahun 2010 sebesar 346 ton tersebut terjadi akibat peningkatan yang tinggi di subround tiga. Pada subround Januari-April mengalami penurunan sebesar 63 ton (13,61 persen), subround Mei-Agustus turun sebesar 90 ton (93,27 persen), sedangkan subround September-Desember mengalami kenaikan sebesar 499 ton (33,85 persen) jadi subround Januari-Desember meningkat 346 ton (21,83 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama (*year on year*) tahun 2008 (lihat lampiran Tabel 8).

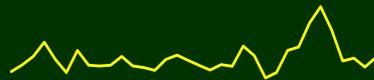
Angka Ramalan III (ARAM III) produksi jagung tahun 2011 diperkirakan sebesar 2,44 ribu ton Pipilan Kering atau meningkat sebesar 510 ton (26,41 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Peningkatan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sekitar 292 hektar (25,13 persen), demikian pula dengan produktivitasnya diperkirakan akan naik sebesar 0,17 kuintal/hektar (1,02 persen).

Peningkatan produksi jagung tahun 2011 sebesar 510 ton (26,41 persen) terjadi pada realisasi subround Januari-April sebesar 295 ton (73,75 persen) dan realisasi subround Mei-Agustus sebesar 313 ton (62,98 persen), sedangkan perkiraan subround September-Desember akan mengalami penurunan 98 ton (9,48 persen) dibandingkan dengan subround yang sama pada tahun 2010 (*year on year*).

Uraian	2009	2010	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009-2010		Perkembangan 2010-Aram III 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JAGUNG							
Luas Panen (Ha)	965	1.162	1.454	197	20,41	292	25,13
Produktivitas (Kw/Ha)	16,42	16,62	16,79	0,20	1,22	0,17	1,02
Produksi (Ton)	1.585	1.931	2.441	346	21,83	510	26,41

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2009-2011





3. Produksi Kedelai

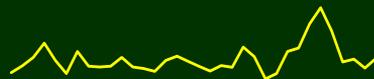
Angka Tetap (ATAP) produksi kedelai tahun 2010 sebesar 601 ton Biji Kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2009, terjadi penurunan sebesar 607 ton (50,25 persen). Penurunan produksi kedelai tahun 2010 terjadi karena menurunnya luas panen seluas 579 hektar atau 50,35 persen, namun demikian produktivitas mengalami peningkatan tipis sebesar 0,03 kuintal/hektar (0,29 persen).

Penurunan produksi kedelai tahun 2010 sebesar 601 ton terjadi pada seluruh subround, yaitu Januari-April sebesar 126 ton (30,29 persen), Mei-Agustus sebesar 297 ton (68,91 persen), dan subround September-Desember sebesar 184 ton (50,97 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama (*year on year*) tahun 2009 (Lampiran Tabel 9).

Angka Ramalan III (ARAM III) produksi kedelai tahun 2011 diperkirakan sebesar 687 ton Biji Kering. Dibandingkan dengan produksi tahun 2010, terjadi peningkatan sebesar 86 ton (14,31 persen). Peningkatan produksi kedelai tahun 2011 diperkirakan terjadi karena kembali meningkatnya luas panen seluas 60 hektar atau 10,51 persen, demikian pula dengan produktivitasnya diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,35 kuintal/hektar (3,32 %).

Tabel 8.		Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011					
Uraian	2009	2010	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009-2010		Perkembangan 2010-Aram III 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KEDELAI							
Luas Panen (Ha)	1.150	571	631	-579	-50.35	60	10.51
Produktivitas (Kw/Ha)	10.50	10.53	10.88	0.03	0.29	0.35	3.32
Produksi (Ton)	1.208	601	687	-607	-50.25	86	14.31

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2009-2011



4. Produksi Ubi Kayu

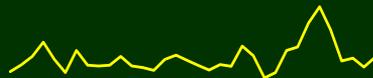
Angka Tetap (ATAP) produksi ubi kayu tahun 2010 sebesar 25,11 ribu ton umbi basah, mengalami peningkatan mencapai 105,38 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2009 atau sebesar 12,89 ribu ton. Peningkatan produksi tahun 2010 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan yang tajam luas panen yaitu mencapai 1.264 hektar atau 114,39 persen. Peningkatan produksi dan luas panen ternyata tidak disertai dengan peningkatan produktivitas. Produktivitas ubi kayu tahun 2010 menurun 4,65 kuintal/hektar (4,20 persen).

Peningkatan produksi ubi kayu tahun 2010 sebesar 12,89 ribu ton terjadi pada subround September-Desember, sedangkan pada subround lainnya justru mengalami penurunan. Pada subround September-Desember produksi ubi kayu mengalami peningkatan yang sangat dramatis, yaitu meningkat hingga 14,11 ribu ton dengan persentase perkembangan mencapai 374,66 persen. Sedangkan pada subround Januari-April dan Mei-Agustus produksinya mengalami penurunan masing-masing turun sebesar 1.096 ton (23,68 persen) dan 124 ton (3,23 persen) dibandingkan dengan produksi ubi kayu pada subround yang sama tahun 2009 (*year on year*).

Tabel 9. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009-2010		Perkembangan 2010-Aram III 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UBI KAYU							
Luas Panen (Ha)	1,105	2,369	2,469	1,264	114.39	100	4.22
Produktivitas (Kw/Ha)	110.66	106.01	110.2	-4.65	-4.20	4.19	3.95
Produksi (Ton)	12,228	25,114	27,209	12,886	105.38	2,095	8.34

Keterangan: Kualitas produksi Ubi Kayu adalah umbi basah



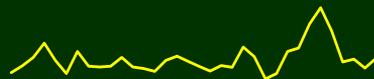
Angka Ramalan III (ARAM III) produksi ubi kayu tahun 2011 diperkirakan sebesar 27,21 ribu ton umbi basah, mengalami peningkatan sebesar 8,34 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2010 atau sebanyak 2,09 ribu ton. peningkatan produksi tahun 2011 diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan luas panen maupun produktivitas masing-masing sebesar 100 hektar (4,22 persen) dan 4,19 kuintal/hektar (3,95 persen).

5. Produksi Ubi Jalar

Angka Tetap (ATAP) produksi ubi jalar tahun 2010 sebesar 10,56 ribu ton umbi basah atau turun sebesar 42 ton (0,40 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2009. Penurunan produksi tersebut terjadi karena turunnya luas panen sekitar lima hektar (0,48 persen). Sedangkan produktivitasnya naik sebesar 0,09 kuintal/hektar (0,09 persen).

Penurunan produksi ubi jalar tahun 2010 sebesar 42 ton terjadi pada dua subround, yaitu subround Januari-April sebesar 1,51 ribu ton (39,32 persen) dan subround Mei-Agustus sebesar 899 ton (26,15 persen), sedangkan pada subround September-Desember terjadi peningkatan produksi sebesar 2,37 ribu ton (71,20 persen) dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama tahun 2009 (*year on year*).

Angka Ramalan III (ARAM III) produksi ubi jalar tahun 2011 diperkirakan sebesar 14,68 ribu ton umbi basah atau meningkat sebesar 4,12 ribu ton (39,05 persen) dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Peningkatan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sekitar 390 hektar (37,54 persen), sedangkan produktivitasnya diperkirakan juga akan meningkat sebesar 1,12 kuintal/hektar (1,10 persen).



Tabel 10.		Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Komoditi, 2009-2011					
Uraian	2009	2010	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009-2010		Perkembangan 2010-Aram III 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UBI JALAR							
Luas Panen (Ha)	1,044	1,039	1,423	-5	-0.48	390	37.54
Produktivitas (Kw/Ha)	101.52	101.61	102.73	0.09	0.09	1.12	1.10
Produksi (Ton)	10,599	10,557	14,680	-42	-0.40	4,123	39.05

Sumber : Laporan Luas Tanam Padi dan Palawija, 2009-2011

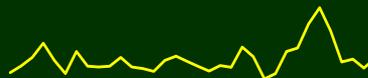
Keterangan: Kualitas produksi Ubi Kayu adalah umbi basah

D. NILAI TUKAR PETANI (NTP)

1. Perkembangan Nilai Tukar Petani

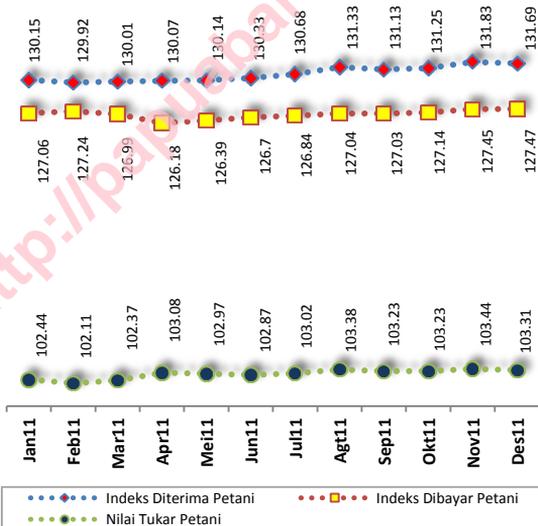
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima (I_t) petani terhadap indeks harga yang dibayar (I_b) petani (dalam persentase). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat/kemampuan daya beli petani di pedesaan, disamping itu juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Jika NTP lebih besar dari 100 berarti petani mempunyai surplus atas usaha taninya, sebaliknya bila di bawah 100, berarti petani tidak mampu membiayai kebutuhan rumah tangga dan mencukupi biaya-biaya usaha taninya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga pedesaan pada delapan kabupaten di Provinsi Papua Barat setiap bulan diperoleh informasi perkembangan NTP Papua Barat yang secara resmi dirilis kepada publik. Nilai NTP Papua Barat tahun 2011 sebesar 103,31, dengan indeks yang diterima petani sebesar 131,69 dan indeks yang dibayarkan petani sebesar 127,47. Nilai

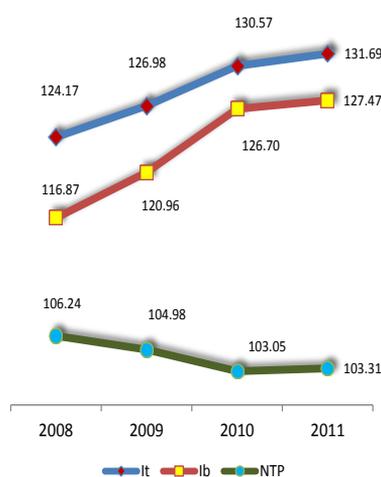


NTP 103,31 artinya petani mengalami surplus usaha sebesar 3,31 persen terhadap tahun dasar (2007=100).

Selama empat tahun terakhir nilai NTP Papua Barat selalu surplus tetapi cenderung mengalami penurunan, meskipun dalam setahun terakhir (tahun 2011) nilai NTP meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2008 nilai NTP Papua Barat mencapai 106,24, kemudian nilai NTP mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi 104,98. Di tahun 2010 nilai NTP kembali mengalami penurunan menjadi 103,05 dan akhirnya di tahun 2011 nilai NTP Papua Barat meningkat menjadi 103,31. Penurunan nilai NTP umumnya disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian mengalami penurunan dan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.

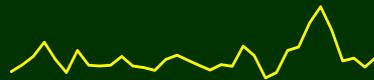


Gambar 3. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Januari-Desember 2011 Provinsi Papua Barat (2007=100)



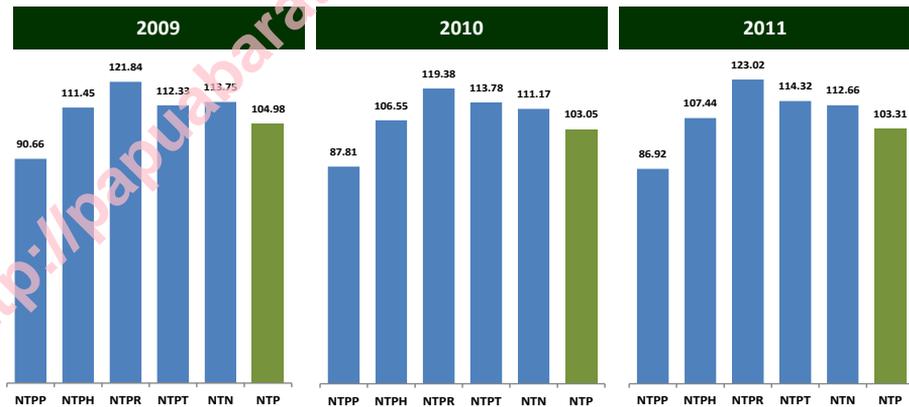
Gambar 4. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Barat 2008-2011 (2007=100)





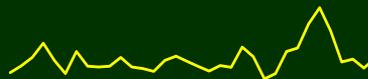
2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor

NTP Papua Barat berdasarkan subsektor menunjukkan bahwa seluruh subsektor mengalami surplus usaha kecuali pada subsektor tanaman pangan. Subsektor dengan nilai NTP tertinggi berada pada subsektor perkebunan rakyat (NTPR). Subsektor ini memiliki NTP sebesar 123,02 dengan indeks yang dibayarkan petani sebesar 125,0 dan indeks yang diterima petani sebesar 153,89. Hal ini dapat diartikan bahwa petani pertanian perkebunan rakyat pendapatannya dari usaha pertanian lebih baik dari pada petani pada subsektor lain. Sementara itu pada subsektor tanaman pangan (NTPP) merupakan subsektor dengan NTP terendah di Papua Barat dan menjadi satu-satunya subsektor dengan NTP dibawah 100. Artinya indeks yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dari indeks yang diterima petani atau dapat dikatakan petani tanaman pangan belum *survive*.



Gambar 5. Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Papua Barat Tahun 2009-2011

Selama tahun 2011 nilai NTP Papua Barat selalu berada diatas 100, artinya indeks yang diterima petani selalu lebih tinggi dari indeks yang dibayarkan petani, atau dengan kata lain

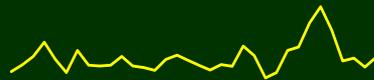


bahwa petani di Papua Barat selalu mengalami surplus usaha tani. Meskipun demikian peningkatan nilai tukar petani terbilang cukup rendah. Dalam waktu satu tahun nilai indeks hanya meningkat 0,26 persen, yaitu meningkat dari 103,05 (NTP bulan Desember 2010) menjadi 103,31 (NTP bulan Desember 2011). Sebagai perbandingan inflasi pedesaan bulan Desember 2011 terhadap Desember 2010 (*year on year*) adalah sebesar 0,50 persen. Jadi surplus usaha tani selama setahun yang hanya mencapai 0,26 persen ternyata masih lebih rendah dari nilai inflasi pedesaan pada periode yang sama. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa walaupun nilai tukar petani mengatakan bahwa terjadi surplus usaha namun ternyata surplus usaha tani tersebut tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa yang membuat kehidupan para petani menjadi lebih sulit.

E. INFLASI PEDESAAN

Inflasi Pedesaan merupakan cerminan dari perkembangan harga-harga barang konsumsi rumah tangga di wilayah pedesaan. Komponen indeks konsumsi rumah tangga pedesaan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok konsumsi rumah tangga yaitu bahan makanan, makanan jadi; sandang; perumahan; kesehatan; pendidikan rekreasi dan olah raga; serta transportasi dan komunikasi. Data inflasi pedesaan diperoleh dari Survei Harga Pedesaan yang rutin dikumpulkan setiap bulan.

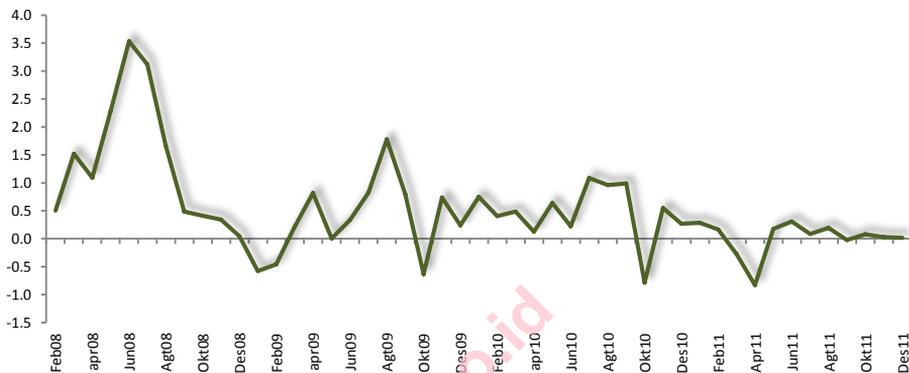
IHK Pedesaan Papua Barat bulan Desember 2011 adalah sebesar 133,67, artinya secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di daerah pedesaan sebesar 33,67 persen terhadap harga pada tahun dasar tahun 2007. Kenaikan harga tertinggi berada pada kelompok pengeluaran bahan makanan, yaitu sebesar 51,04 persen atau sekitar satu setengah kali lipat dibandingkan dengan harga dasar tahun 2007. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki nilai IHK yaitu 104,02. Artinya hanya terjadi kenaikan harga sekitar 4,02 persen terhadap tahun 2007.



Tabel 11.		Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2011 (2007=100)			
Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan				
	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Bahan Makanan	128,99	139,08	151,83	151,04	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	108,59	114,34	119,89	122,25	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	120,84	121,52	123,18	123,12	
Sandang	118,21	126,26	127,71	131,44	
Kesehatan	115,84	120,87	122,47	123,99	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	104,92	107,12	109,70	112,66	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	107,80	102,16	103,54	104,02	
UMUM/TOTAL	120,21	125,65	133,00	133,67	

Sumber: Survei Harga Pedesaan, 2008-2011

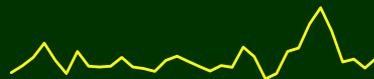
Sepanjang bulan Februari 2008 sampai dengan Desember 2011, inflasi pedesaan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2008 dengan nilai inflasi mencapai 3,54 persen. Inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan bersangkutan. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2011 yaitu -0,82 persen. Sedangkan selama tahun 2011 fluktuasi harga telah mulai terkendali. Dalam 12 bulan meskipun terjadi sembilan kali inflasi dan hanya tiga kali deflasi namun inflasi pedesaan tertinggi hanya mencapai 0,31 persen yang terjadi pada bulan Juni 2011. Sedangkan dari tiga deflasi yang tertinggi terjadi pada bulan April 2011 yaitu -0,82 persen. Sebagai catatan bahwa deflasi tersebut adalah yang tertinggi dalam sejarah deflasi di Papua Barat.



Gambar 6. Perkembangan Laju Inflasi Pedesaan Februari 2008-Desember 2011 Provinsi Papua Barat (2007=100)

Tahun 2011 tingkat harga di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 menurut kelompok pengeluaran. Lima dari tujuh kelompok pengeluaran memiliki inflasi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya bahkan dua diantaranya terjadi deflasi. Dua kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan inflasi adalah kelompok pengeluaran sandang (1,14 persen menjadi 2,92 persen) serta kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga (2,40 menjadi 2,70 persen).

Kestabilan harga barang dan jasa pedesaan di Papua Barat terlihat dari rendahnya inflasi tahun kalender 2011. Inflasi tahun kalender tahun 2011 hanya sebesar 0,50 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun kalender tahun 2009 (4,53 persen) dan tahun 2010 (5,85 persen). Inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran diwarnai dengan terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran bahan makanan (-0,52 persen) dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (-0,05 persen). Padahal kelompok pengeluaran bahan makanan di tahun 2009 dan 2010 selalu menjadi pemicu utama tingginya inflasi tahun kalender, persentasenya mencapai 7,82 persen dan 9,17 persen.



Tabel 12.		Laju Inflasi Pedesaan Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2011 (2007=100)		
Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Tahun Kalender			
	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bahan Makanan	7,82	9,17	-0,52	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,30	4,85	1,97	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	4,19	1,37	-0,05	
Sandang	6,81	1,14	2,92	
Kesehatan	4,34	1,32	1,24	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	2,10	2,40	2,70	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-5,23	1,35	0,46	
UMUM/TOTAL	4,53	5,85	0,50	

Sumber: Survei Harga Pedesaan, 2008-2011

Stabilitas harga di daerah pedesaan ini turut berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani yang digambarkan dengan kenaikan indeks pada nilai tukar petani di tahun 2011. sebelumnya di tahun 2009 dan 2010 nilai tukar petani mengalami penurunan dari 106,24 (tahun 2008) menjadi 104,98 dan 103,05 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 103,31. Rendahnya inflasi ini pula turut menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada kondisi Maret 2011 dan September 2011 (lihat bab kemiskinan). Rendahnya angka inflasi pedesaan diperkirakan dapat menaikkan daya beli masyarakat di pedesaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup terutama bahan makanan.



F. INFLASI

Inflasi (untuk daerah perkotaan) merupakan salah satu indikator makro yang perkembangannya dimonitor secara ketat oleh pemerintah, karena besaran agregat inflasi secara langsung akan berdampak terhadap daya beli masyarakat berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan buruh/pekerja swasta. Inflasi terjadi akibat ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran pasar barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti nilai tukar/kurs, volume uang beredar, bahkan dampak dari ekspektasi masyarakat. Dimensi lain yang terkena dampak negatif dari inflasi adalah meningkatnya nominal garis kemiskinan dan melemahnya *purchasing power parity* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IHK Papua Barat tahun 2011 adalah sebesar 144,44, artinya secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di daerah perkotaan sebesar 44,44 persen atau hampir satu setengah kali lipat terhadap harga pada tahun dasar tahun 2007. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yaitu 62,15 persen terhadap harga tahun dasar 2007. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada kelompok pengeluaran sandang. Persentase kenaikan harga pada kelompok pengeluaran ini hanya sebesar 23,39 persen terhadap tahun dasar 2007.

Bila diperbandingkan antara perubahan harga di perkotaan dan pedesaan, tampak bahwa kenaikan harga lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan. Harga-harga barang dan jasa diperkotaan meningkat 44,44 persen selama empat tahun terakhir, sedangkan pada daerah pedesaan kenaikan harganya relatif lebih rendah, yaitu hanya 33,67 persen terhadap harga tahun dasar 2007. Bila dilihat dari tingkat kenaikan harga selama empat tahun terakhir menurut kelompok pengeluarannya pun berbeda. Di daerah pedesaan kenaikan harga tertinggi terdapat pada kelompok pengeluaran bahan makanan (nilai IHK 151,04), sedangkan kenaikan harga



terendah terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (nilai IHK 104,02). Untuk daerah perkotaan tingkat kenaikan harga tertinggi dalam empat tahun terakhir berada pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (nilai IHK 162,15), dan tingkat kenaikan harga terendahnya berada pada kelompok pengeluaran sandang (nilai IHK 123,39).

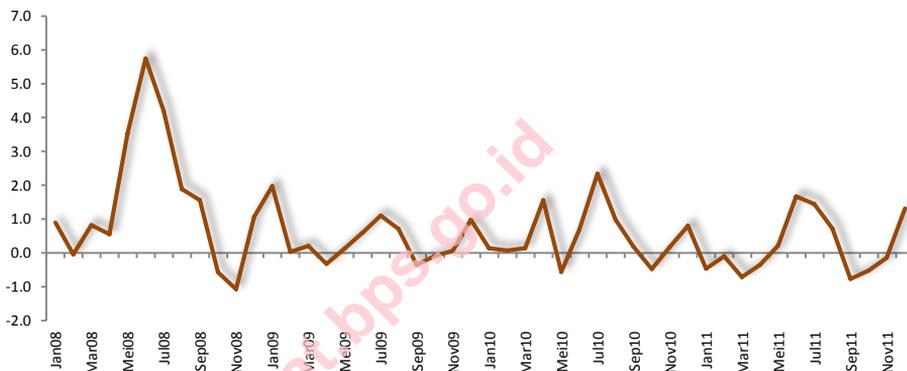
Tabel 13.		Indeks Harga Konsumen Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2011 (2007=100)			
Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen (IHK)				
	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Bahan Makanan	137.79	144,82	156,90	156.45	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	139.96	147,45	159,37	162.15	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	121.72	131,81	137,48	142.76	
Sandang	106.55	117,35	120,11	123.39	
Kesehatan	118.67	125,78	129,93	134.98	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	107.77	113,72	120,49	123.89	
Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	112.92	111,96	116,73	123.69	
UMUM/TOTAL	126,21	132,80	141,10	144,44	

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2008-2011

Sepanjang bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2011, inflasi pedesaan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2008 dengan nilai inflasi mencapai 5,75 persen. Inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan bersangkutan. Kenaikan harga BBM ini memberikan *multiplier effect* terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa di Papua



Barat dan seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun tersebut juga inflasi tahun kalender Papua Barat memecahkan rekor tertinggi di Indonesia dengan nilai inflasi mencapai 20,06 persen. Namun demikian inflasi mulai terkendali pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 7. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Papua Barat Januari 2008-Desember 2011

Kondisi perubahan harga di Papua Barat tahun 2011 relatif stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 12 bulan di tahun 2011 hanya terjadi lima kali inflasi dan deflasi terjadi sebanyak tujuh kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,67 persen dengan pemicu utama inflasi adalah kenaikan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan (nilai inflasi 3,60 persen) serta transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan (nilai inflasi 2,50 persen). Sedangkan untuk deflasi tertinggi terjadi bulan September yaitu sebesar -0,76 persen dengan penyebab utama penurunan harga terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan (nilai inflasi -2,92 persen) dan kelompok bahan makanan (-1,06 persen). Inflasi terjadi pada bulan Juni adalah musim libur sekolah, bulan Juli-Agustus adalah bulan puasa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri,



serta di bulan Desember karena ada libur peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2012. Dampak dari libur sekolah Hari Raya Idul Fitri dan libur Natal dan Tahun Baru terlihat dari tingginya inflasi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan serta kenaikan harga pada kelompok bahan makanan.

Untuk daerah seperti Papua Barat yang menggantungkan ketersediaan sebagian kebutuhan barang dan jasa dari luar provinsi terutama melalui jalur laut, kelancaran transportasi dan distribusi barang sangat mempengaruhi kestabilan harga pasar. Tidak ada pilihan selain harus memonitor perkembangan harga dan permintaan kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi akibat dari kenaikan harga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, dampaknya kinerja perekonomian menjadi menurun dan kemiskinan cenderung meningkat.

Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Papua Barat Tahun 2011 (2007=100)											
	Inflasi											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bahan Makanan	-0.75	-0.40	-1.33	-2.37	0.47	3.60	1.38	0.89	-1.06	-1.66	-1.09	2.19
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.05	0.17	-0.76	0.08	0.49	0.15	-0.07	0.17	0.08	0.33	0.18	0.86
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.31	0.66	0.10	0.80	0.16	0.05	0.31	0.62	0.08	0.03	0.49	0.19
Sandang	0.38	-0.01	0.14	0.27	0.17	0.12	0.67	0.74	0.00	0.06	0.51	-0.34
Kesehatan	0.21	0.39	1.30	0.00	0.23	-0.51	1.69	0.15	-0.01	0.13	0.00	0.26
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	0.04	0.00	0.14	0.07	0.06	0.26	0.04	0.24	1.67	0.28	-0.01	0.00
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1.52	-0.98	-1.28	1.35	-0.36	2.50	4.69	1.69	-2.92	-0.09	0.23	2.74
UMUM/TOTAL	-0.46	-0.09	-0.70	-0.34	0.22	1.67	1.45	0.73	-0.76	-0.51	-0.14	1.32

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2011



Stabilitas harga di tahun 2011 dapat terlihat dari laju inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender Papua Barat menurun tajam dari 5,22 persen di tahun 2009 dan 6,25 persen di tahun 2010 menjadi hanya 2,36 persen di tahun 2011. Pemicu utama inflasi tahun kalender 2011 adalah kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (nilai inflasi 5,96 persen). Sedangkan penyebab utama turunnya inflasi tahun kalender ini adalah terjadi penurunan pada kelompok pengeluaran bahan makanan terhadap tahun 2010 (8,34 persen menjadi -0,29 persen) dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,08 persen menjadi 1,74 persen). Rendahnya laju inflasi tahun kalender ini membuktikan bahwa kenaikan harga barang dan jasa selama tahun 2011 ini telah berhasil ditekan. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan belum berhasil diturunkan, diduga TPT yang tinggi memberikan pengaruh pada keadaan ini.

Tabel 15		Laju Inflasi Tahun Kalender Provinsi Papua Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2009-2011 (2007=100)		
Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi Tahun Kalender			
	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bahan Makanan	5,10	8,34	-0,29	
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,35	8,08	1,74	
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,29	4,30	3,84	
Sandang	10,13	2,36	2,73	
Kesehatan	5,99	3,30	3,89	
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	5,52	5,96	2,82	
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,85	4,26	5,96	
UMUM/TOTAL	5,22	6,25	2,36	

Sumber: Survei Harga Konsumen, 2009-2011



G. KINERJA PEREKONOMIAN

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu PDRB pendekatan produksi/lapangan usaha dan PDRB pendekatan pengeluaran/penggunaan.

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). PDRB ADHB menggunakan harga berlaku saat PDRB dihitung (*current price*), sedangkan pada PDRB ADHK menggunakan harga pada suatu tahun yang disebut tahun dasar agar terbebas dari pengaruh inflasi. Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

1. Struktur Ekonomi

Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Papua Barat tahun 2011 mengalami peningkatan tajam sebesar 9.290,84 miliar rupiah menjadi 36.170,45 miliar rupiah. Kondisi ini meningkat dibandingkan PDRB tahun 2010 yang sebesar 26.879,61 miliar rupiah. Bila tanpa memperhitungkan subsektor minyak dan gas (migas) PDRB ADHB Papua Barat mengalami peningkatan dari 16.180,48 miliar rupiah di tahun 2010 menjadi 18.949,86 miliar rupiah di tahun 2011 atau terjadi peningkatan sebesar 2.769,38 miliar rupiah. Selisih antara PDRB dengan migas dan tanpa migas mencapai 17.220,59 miliar rupiah atau sebesar 47,61 persen. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat sangat signifikan.





Bahkan dari tahun ke tahun kontribusi subsektor migas terus meningkat. Di tahun 2009 kontribusi subsektor migas hanya 21,53 persen, kemudian meningkat menjadi 39,80 persen di tahun 2010. Selanjutnya di tahun 2011 kontribusi subsektor ini sebesar 47,61 persen atau hampir mencapai setengah dari total PDRB Papua Barat. Subsektor migas yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB Papua Barat terutama berasal dari gas alam cair (*Liquid Natural Gas*) yang diproduksi oleh LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel 16.		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011				
Lapangan Usaha	PDRB ADHB			Struktur Ekonomi		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	4199944.05	4664455.36	4976708.57	23.15	17.35	13.76
Pertambangan dan Penggalian	2268377.64	2302782.91	2615421.89	12.50	8.57	7.23
Industri Pengolahan	5091747.99	11970841.30	18689731.89	28.06	44.54	51.67
Listrik, Air, dan Gas	88156.15	97557.00	110622.75	0.49	0.36	0.31
Konstruksi	1678230.58	2034290.84	2483291.41	9.25	7.57	6.87
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1710450.82	1888243.87	2349080.27	9.43	7.02	6.49
Pengangkutan dan Komunikasi	1248415.03	1437073.75	1701266.32	6.88	5.35	4.70
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	429268.09	556889.28	661906.16	2.37	2.07	1.83
Jasa-jasa	1429902.65	1927478.33	2582426.45	7.88	7.17	7.14
PDRB	18144492.99	26879612.63	36170455.69	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa Migas	14238063.15	16180481.62	18949861.70	78.47	60.20	52.39

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2009-2011



Berdasarkan lapangan usaha, kontribusi terbesar PDRB Papua Barat berasal dari Sektor Industri pengolahan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor industri pengolahan menjelma menjadi sebuah kekuatan perekonomian baru di Papua Barat. Di tahun 2009 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 28,06 persen. Kemudian di tahun 2010 kontribusinya semakin meningkat menjadi 44,54 persen. Selanjutnya kontribusi sektor ini di tahun 2011 mencapai 51,67 persen atau lebih dari setengah total PDRB Papua Barat. Semula sebelum sektor industri LNG beroperasi, kontributor utama PDRB Papua Barat adalah sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian semakin menurun beberapa tahun terakhir, walaupun sebelumnya juga telah mengalami tren menurun, tetapi dengan kemunculan produksi LNG Tangguh di Teluk Bintuni berdampak terhadap kontribusi sektor pertanian semakin mengecil.

Penggunaan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011					
	PDRB ADHB			Struktur Ekonomi		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4199944.05	4664455.36	4976708.57	55.34	41.92	36.33
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	2268377.64	2302782.91	2615421.89	0.59	0.43	0.36
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5091747.99	11970841.30	18689731.89	20.94	17.28	15.61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	88156.15	97557.00	110622.75	31.00	24.52	21.92
Perubahan Inventori	1678230.58	2034290.84	2483291.41	2.28	5.35	4.51
Ekspor	1710450.82	1888243.87	2349080.27	36.83	45.55	51.55
Impor (-)	1248415.03	1437073.75	1701266.32	46.98	35.05	30.29
PDRB	18144492.99	26879612.63	36170455.69	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan, 2009-2011





Struktur ekonomi berdasarkan PDRB penggunaan juga mengalami pergeseran sejak mulai berproduksinya LNG Tangguh. Semula kontributor terbesar PDRB penggunaan adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. *Share* pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2009 mencapai 55,34 persen dan masih menjadi kontributor utama dalam PDRB penggunaan. Selanjutnya di tahun 2010 dan tahun 2011 kontribusinya mengalami penurunan, yaitu sebesar 41,92 persen dan 36,33 persen. Mulai pada saat itu lah kontributor utama PDRB penggunaan beralih ke ekspor. Kontribusi ekspor Papua Barat di tahun 2009 hanya 36,83 persen, masih lebih rendah dari penggunaan untuk impor yang mencapai 46,98 persen. Kemudian di tahun 2010 dan 2011 ekspor mulai menjadi kontributor utama PDRB penggunaan Papua Barat. Kontribusinya di tahun tersebut mencapai 45,55 persen dan 51,55 persen.

Sejak mulai beroperasinya LNG Tangguh pertengahan tahun 2009, secara otomatis kontribusi subsektor migas terhadap total PDRB meningkat, sektor industri pengolahan menjadi sektor unggulan karena memiliki *share* yang tertinggi di Papua Barat, dan aktivitas ekspor Papua Barat serta merta melonjak untuk mengeksport hasil produksi gas alam cair yang dihasilkan oleh LNG Tangguh.

2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah umumnya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Papua Barat tahun 2011 sebesar 11.916,13 miliar rupiah meningkat 2.549,73 miliar rupiah dari 9.366,41 miliar rupiah di tahun 2010. Di sisi





lain, PDRB ADHK tanpa migas Papua Barat tahun 2011 sebesar 7.614,22 miliar rupiah meningkat 676,01 miliar rupiah dari 6.938,21 miliar rupiah di tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2011 dengan migas sebesar 27,22 persen. Sebelumnya di tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga sangat fantastis hingga mencapai 28,54 persen. Dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Papua Barat memang membumbung sangat tinggi. Hal ini tidak lain disebabkan oleh efek mulai beroperasinya perusahaan penambangan dan pengilangan gas alam cair, LNG Tangguh, di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dampak luar biasa ini disebabkan oleh diproduksinya gas alam cair dalam skala besar. Kandungan gas alam cair salah satu tambang LNG terbesar di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai 14,4 triliun kaki kubik. Serta merta PDRB Papua Barat yang memiliki nilai agregat yang kecil bila dibandingkan dengan agregat provinsi lain secara nasional (kontribusinya hanya sekitar 0,32 persen) langsung terangkat dengan mulai dihitungnya nilai tambah produksi gas alam cair ini. Terangkatnya nilai agregat PDRB inilah yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi Papua Barat meroket hingga mencapai 28,54 persen (tahun 2010) dan 27,22 persen (tahun 2011).

Kontribusi subsektor migas yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat besarnya kontribusi subsektor migas seperti yang terjadi di Papua Barat ini seringkali kurang menggambarkan kondisi riil pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Untuk itulah sebagai pembandingnya dapat digambarkan dengan melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi tanpa migas, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tanpa menyertakan unsur migas, baik itu berupa pertambangan maupun industri pengolahan migas.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas tahun 2011 sebesar 9,74 persen, meningkat dari 6,98 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Sebelumnya di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas hanya sebesar 1,34 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat, baik itu dengan maupun tanpa migas telah berada pada





range sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Barat 2010-2014 yang memasang target 6,2-6,8 persen (2010) dan 7,0-7,6 persen. Bahkan untuk sasaran RPJM pertumbuhan ekonomi 2014 pun telah dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun demikian, target 2014 masih panjang, pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat dapat terus membaik dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, atau dapat terjadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan atau bahkan penurunan mengingat ekonomi global sedang terpuruk karena krisis ekonomi di Eropa.

Tabel 18.		PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2011					
Lapangan Usaha	PDRB ADHK			Pertumbuhan Ekonomi			Sumber Pertumbuhan 2011
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	1896815.48	2014324.40	2045718.10	3.83	6.20	1.56	0.34
Pertambangan dan Penggalian	1099264.98	1090051.52	1155963.54	-0.16	-0.84	6.05	0.70
Industri Pengolahan	1368459.98	3010930.03	4957829.44	56.29	120.02	64.66	20.79
Listrik, Air, dan Gas	31766.02	34085.13	37102.74	9.03	7.30	8.85	0.03
Konstruksi	654538.95	718468.24	806397.72	12.96	9.77	12.24	0.94
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	715364.04	743881.85	833958.19	6.49	3.99	12.11	0.96
Pengangkutan dan Komunikasi	551873.87	612201.04	691588.95	16.36	10.93	12.97	0.85
Kuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	186034.15	198241.93	220504.93	23.68	6.56	11.23	0.24
Jasa-jasa	782859.77	944223.36	1167070.11	13.28	20.61	23.60	2.38
PDRB	7286977.24	9366407.50	11916133.71	13.87	28.54	27.22	27.22
PDRB Tanpa Migas	6485553.59	6938208.59	7614217.26	1.34	6.98	9.74	



Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2011 ini didorong oleh dua sektor utama, yaitu industri pengolahan (64,66 persen) dan jasa-jasa (23,60 persen). Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi Papua Barat menurut lapangan usaha beberapa tahun ini didominasi oleh sektor industri pengolahan. Tiga tahun ini, industri pengolahan menunjukkan performa yang menakjubkan. Di tahun 2009 pertumbuhannya mencapai 56,29 persen. Selanjutnya di tahun 2010 pertumbuhannya lebih fantastis, yaitu mencapai 120,02 persen. Dan di tahun 2011 industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang tinggi meskipun mengalami perlambatan menjadi 64,66 persen. Dari pertumbuhan ekonomi Papua Barat sebesar 27,22 persen di tahun 2011, sebesar 20,79 persennya bersumber pada industri pengolahan. Sedangkan sumber pertumbuhan untuk sektor-sektor lainnya tidak lebih dari satu persen kecuali sektor jasa-jasa yang mencapai 2,38 persen. Tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan ini seperti sebelumnya disebutkan berasal dari produksi gas alam cair LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

PDRB Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan dari 7.286,98 miliar rupiah menjadi 9.366,41 miliar rupiah di tahun 2010. Di tahun 2011, PDRB ADHK bertambah 2.549,73 miliar rupiah menjadi 11.916,13 miliar rupiah. Nilai agregat tertinggi PDRB ADHK tahun 2011 digunakan untuk ekspor, yaitu sebesar 5.901,86 miliar rupiah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga berada dipenggunaan terbesar kedua dengan nilai agregat sebesar 4.722,94 miliar rupiah.

Berdasarkan PDRB menurut penggunaan, pertumbuhan tertinggi di tahun 2011 berasal dari penggunaan ekspor yaitu sebesar 53,18 persen. Kondisi ini meningkat dari kondisi sebelumnya yaitu -12,34 persen (2009) dan 41,11 persen (2010). Pembentukan modal tetap bruto dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi kegiatan yang memiliki terbesar





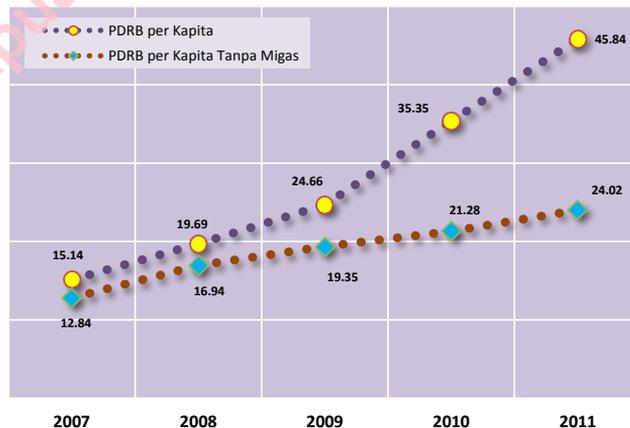
setelah ekspor yang masing-masing memiliki pertumbuhan 10,85 persen dan 10,04 persen. Sedangkan dari 27,22 persen pertumbuhan Papua Barat 21,88 persen diantaranya bersumber dari penggunaan ekspor, sedangkan 5,34 persen sisanya bersumber dari kegiatan penggunaan lainnya (pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,60 persen; pembentukan modal tetap bruto 2,34 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah 0,61 persen; perubahan inventori 0,55 persen; dan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba 0,04 persen) setelah dikurangi dengan sumber pertumbuhan untuk impor sebesar 2,79 persen.

Tabel 19.		PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan Provinsi Papua Barat Tahun: 2009-2011					
Penggunaan	PDRB ADHK			Pertumbuhan Ekonomi			Sumber Pertumbuhan 2011
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4032812.48	4292091.43	4722941.50	6.18	6.43	10.04	4.60
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	43965.59	46413.98	49850.87	19.91	5.57	7.40	0.04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1235776.53	1423568.75	1480563.47	7.42	15.20	4.00	0.61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1875045.94	2019927.40	2239124.81	4.90	7.73	10.85	2.34
Perubahan Inventori	195608.72	665584.12	716678.88	-10.58	240.26	7.68	0.55
Ekspor	2730361.69	3852786.53	5901860.27	-12.34	41.11	53.18	21.88
Impor (-)	2826593.71	2933964.71	3194886.10	-23.74	3.80	8.89	2.79
PDRB	7286977.239	9366407.50	11916133.71	13.87	28.54	27.22	27.22



4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB (atas dasar harga berlaku) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun berjalan. Pada tahun 2011 angka PDRB per kapita diperkirakan mencapai 45,84 juta rupiah per tahun dengan laju peningkatan sebesar 29,67 persen. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan PDRB per kapita pada tahun 2010 yaitu 35,35 juta rupiah atau meningkat 10,49 juta rupiah dalam satu tahun. Sedangkan untuk melihat PDRB per kapita yang lebih menggambarkan kondisi perekonomian Papua Barat dapat di lihat dari PDRB per kapita tanpa migas. Seperti halnya PDRB per kapita dengan migas, PDRB per kapita tanpa migas Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB per kapita Papua Barat meningkat dari 21,28 juta rupiah per tahun tahun 2010 menjadi 24,02 juta rupiah per tahun di tahun 2011.



Gambar 8. PDRB Per Kapita Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2011





DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2011*. BPS: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Agustus 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar (Angka Ramalan III Tahun 2011)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Papua Barat 2011 (Bulan Januari-Desember 2011)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Inflasi Pedesaan Provinsi Papua Barat (Bulan Januari-Desember 2011)*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Maret 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Provinsi Papua Barat September 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Tahun 2010*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Papua Barat Dalam Angka 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2011. *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.



LAMPIRAN

**Tabel 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2008-Desember 2011
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011
Januari	106.07	128.70	132.99	140.45
Februari	106.03	128.76	133.10	140.32
Maret	106.91	129.03	133.30	139.34
April	107.51	128.62	135.37	138.86
Mei	111.30	128.80	134.62	139.17
Juni	117.70	129.59	135.56	141.50
Juli	122.64	131.02	138.75	143.55
Agustus	124.96	131.96	140.12	144.60
September	126.91	131.51	140.38	143.49
Oktober	126.20	131.41	139.71	142.76
November	124.87	131.50	139.97	142.56
Desember	126.21	132.80	141.10	144.44

**Tabel 2. Inflasi Bulanan Gabungan Januari 2008-Desember 2011
Provinsi Papua Barat**

Bulan	2008	2009	2010	2011
Januari	0.9	1.98	0.15	-0.46
Februari	-0.03	0.04	0.08	-0.09
Maret	0.83	0.21	0.15	-0.70
April	0.56	-0.32	1.56	-0.34
Mei	3.53	0.14	-0.55	0.22
Juni	5.75	0.61	0.70	1.67
Juli	4.2	1.11	2.35	1.45
Agustus	1.89	0.71	0.99	0.73
September	1.56	-0.34	0.18	-0.76
Oktober	-0.56	-0.08	-0.47	-0.51
November	-1.06	0.07	0.18	-0.14
Desember	1.07	0.99	0.81	1.32



Tabel 3. Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Januari 2008-Desember 2011
Provinsi Papua Barat

Bulan	2008	2009	2010	2011
Januari	103.62	119.51	126.59	133.39
Februari	104.15	118.97	127.10	133.61
Maret	105.74	119.22	127.72	133.25
April	106.89	120.19	127.88	132.15
Mei	109.34	120.20	128.70	132.38
Juni	113.20	120.61	128.99	132.80
Juli	116.73	121.60	130.40	132.91
Agustus	118.67	123.77	131.65	133.17
September	119.25	124.76	132.96	133.15
Oktober	119.74	123.97	131.92	133.25
November	120.15	125.34	132.65	133.65
Desember	120.21	125.65	133.00	133.67

Tabel 4. Inflasi Pedesaan Bulanan Gabungan Februari 2008-Desember 2011
Provinsi Papua Barat

Bulan	2008	2009	2010	2011
Januari		-0.58	0.75	0.29
Februari	0.51	-0.46	0.40	0.16
Maret	1.52	0.21	0.49	-0.27
April	1.10	0.82	0.13	-0.83
Mei	2.29	0.01	0.64	0.17
Juni	3.54	0.34	0.23	0.32
Juli	3.12	0.83	1.09	0.08
Agustus	1.66	1.78	0.96	0.20
September	0.49	0.80	0.99	-0.02
Oktober	0.41	-0.63	-0.78	0.08
November	0.34	1.11	0.55	0.30
Desember	0.05	0.24	0.26	0.01



Tabel 5. Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2008-Desember 2011
Provinsi Papua Barat

Bulan	2008	2009	2010	2011
Januari	99.25	106.82	104.5	102.44
Februari	100.44	107.07	104.06	102.11
Maret	99.87	106.79	104.21	102.37
April	101.57	106.51	104.01	103.08
Mei	104.33	107.14	103.8	102.97
Juni	107.82	107.23	104.15	102.87
Juli	106.99	106.65	103.71	103.02
Agustus	106.24	104.62	103.06	103.38
September	107.95	104.97	102.56	103.23
Oktober	108.26	105.92	102.73	103.23
November	105.69	104.68	102.75	103.44
Desember	106.24	104.98	103.05	103.31

Tabel 6. Indeks Diterima Petani (I_a), Indeks Dibayar Petani (I_b), dan Nilai tukar Petani NTP)
Januari-Desember 2011

Bulan	Indeks Diterima Petani (I _a)	Indeks Diterima Petani (I _b)	Nilai Tukar Petani (NTP)
Januari	130.15	127.06	102.44
Februari	129.92	127.24	102.11
Maret	130.01	126.99	102.37
April	130.07	126.18	103.08
Mei	130.14	126.39	102.97
Juni	130.33	126.7	102.87
Juli	130.68	126.84	103.02
Agustus	131.33	127.04	103.38
September	131.13	127.03	103.23
Oktober	131.25	127.14	103.23
November	131.83	127.45	103.44
Desember	131.69	127.47	103.31



Tabel 7. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2009	2010 (ATAP)	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009 - 2010		Perkembangan 2010 - 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	3.920	3.326	3.428	-594	-15,15	102	3,07
- Mei - Agustus	3.898	3.595	3.276	-303	-7,77	-319	-8,87
- September - Desember	2.668	2.543	3.259	-125	-4,69	716	28,16
- Januari - Desember	10.486	9.464	9.963	-1.022	-9,75	499	5,27
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	34,28	36,54	34,84	2,26	6,59	-1,70	-4,65
- Mei - Agustus	34,45	33,81	33,48	-0,64	-1,84	-0,33	-0,98
- September - Desember	37,93	39,12	40,31	1,19	3,13	1,19	3,04
- Januari - Desember	35,27	36,20	36,18	0,93	2,63	-0,02	-0,06
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	13.438	12.154	11.943	-1.284	-9,55	-211	-1,74
- Mei - Agustus	13.427	12.153	10.969	-1.274	-9,49	-1.184	-9,74
- September - Desember	10.120	9.948	13.138	-172	-1,70	3.190	32,07
- Januari - Desember	36.985	34.255	36.050	-2.730	-7,38	1.795	5,24



Tabel 8. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung
di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2009	2010 (ATAP)	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009 - 2010		Perkembangan 2010 - 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	310	265	442	-45	-14,52	177	66,79
- Mei - Agustus	340	292	468	-48	-14,12	176	60,27
- September - Desember	315	605	544	290	92,06	-61	-10,08
- Januari - Desember	965	1.162	1.454	197	20,41	292	25,13
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	14,92	15,08	15,72	0,16	1,07	0,64	4,24
- Mei - Agustus	17,25	17,01	17,30	-0,24	-1,39	0,29	1,70
- September - Desember	16,98	17,09	17,21	0,11	0,65	0,12	0,70
- Januari - Desember	16,42	16,62	16,79	0,20	1,22	0,17	1,02
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	463	400	695	-63	-13,61	295	73,75
- Mei - Agustus	587	497	810	-90	-15,33	313	62,98
- September - Desember	535	1.034	936	499	93,27	-98	-9,48
- Januari - Desember	1.585	1.931	2.441	346	21,83	510	26,41



Tabel 9. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai
di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2009	2010 (ATAP)	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009 - 2010		Perkembangan 2010 - 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	420	290	136	-130	-30,95	-154	-53,10
- Mei - Agustus	418	127	109	-291	-69,62	-18	-14,17
- September - Desember	312	154	386	-158	-50,64	232	150,65
- Januari - Desember	1.150	571	631	-579	-50,35	60	10,51
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	9,90	10,01	10,23	0,11	1,11	0,22	2,20
- Mei - Agustus	10,30	10,52	10,08	0,22	2,14	-0,44	-4,18
- September - Desember	11,58	11,46	11,34	-0,12	-1,04	-0,12	-1,05
- Januari - Desember	10,50	10,53	10,88	0,03	0,29	0,35	3,32
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	416	290	139	-126	-30,29	-151	-52,07
- Mei - Agustus	431	134	110	-297	-68,91	-24	-17,91
- September - Desember	361	177	438	-184	-50,97	261	147,46
- Januari - Desember	1.208	601	687	-607	-50,25	86	14,31



Tabel 10. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2009	2010 (ATAP)	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009 - 2010		Perkembangan 2010 - 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	398	302	670	-96	-24,12	368	121,85
- Mei - Agustus	343	330	631	-13	-3,79	301	91,21
- September - Desember	364	1.737	1.168	1.373	377,20	-569	-32,76
- Januari - Desember	1.105	2.369	2.469	1.264	114,39	100	4,22
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	116,31	116,99	117,52	0,68	0,58	0,53	0,45
- Mei - Agustus	111,78	112,41	117,02	0,63	0,56	4,61	4,10
- September - Desember	103,44	102,88	102,32	-0,56	-0,54	-0,56	-0,54
- Januari - Desember	110,66	106,01	110,20	-4,65	-4,20	4,19	3,95
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	4.629	3.533	7.874	-1.096	-23,68	4.341	122,87
- Mei - Agustus	3.834	3.710	7.384	-124	-3,23	3.674	99,03
- September - Desember	3.765	17.871	11.951	14.106	374,66	-5.920	-33,13
- Januari - Desember	12.228	25.114	27.209	12.886	105,38	2.095	8,34



Tabel 11. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi
Jalar di Provinsi Papua Barat Menurut Subround, 2009-2011

Uraian	2009	2010 (ATAP)	2011 (Aram III)	Perkembangan 2009 - 2010		Perkembangan 2010 - 2011	
				Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Luas Panen (ha)							
- Januari - April	373	222	354	-151	-40,48	132	59,46
- Mei - Agustus	338	252	393	-86	-25,44	141	55,95
- September - Desember	333	565	682	232	69,67	117	20,71
- Januari - Desember	1.044	1.039	1.429	-5	-0,48	390	37,54
2. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari - April	102,89	104,90	104,47	2,01	1,95	-0,43	-0,41
- Mei - Agustus	101,71	100,76	104,97	-0,95	-0,93	4,21	4,18
- September - Desember	99,79	100,69	100,54	0,90	0,90	-0,15	-0,15
- Januari - Desember	101,52	101,61	102,73	0,09	0,09	1,12	1,10
3. Produksi (ton)							
- Januari - April	3.838	2.329	3.698	-1.509	-39,32	1.369	58,78
- Mei - Agustus	3.438	2.539	4.125	-899	-26,15	1.586	62,47
- September - Desember	3.323	5.689	6.857	2.366	71,20	1.168	20,53
- Januari - Desember	10.599	10.557	14.680	-42	-0,40	4.123	39,05

<http://papuabarat.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315
Telp. 0986.214199 Fax. 0986.214199
E-mail : bps9100@bps.go.id
Homepage : www.irjabar.bps.go.id

